

Implementasi Program Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

oleh

Rizka Febri Ramadhanni
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id
Email: febri rizka94@gmail.com

Abstract

The tidal flood if no treatment were significant from the Government of Pekalongan, slums due to tidal flood in the coastal region Pekalongan will be getting bigger and spread to other areas due to sea water every year getting up to the land area would cause tidal flood that came from shoreline. For the Government of Pekalongan set tidal flood management policies as one of the main priorities of development Pekalongan. This study aims to determine the handling policy implementation tidal flooding in coastal areas Pekalongan, obstacles in the implementation of the tidal flood management policies and countermeasures.

Based on observations and interviews, the implementation of policies to deal with the tidal flood Coastal Pekalongan by the Public Works Department of the City of Pekalongan is a task as local government agencies Pekalongan in the field of public works, namely the implementation of the development, supervision and maintenance of roads, bridges, irrigation, housing and building area. Based on the four critical variables in the implementation of public policy, the role of the DPU Pekalongan in handling flood Rob Coastal Pekalongan has been running well, namely the smooth communication, availability of resources (resources) enough, the attitude and commitment of the implementers (disposition) strong enough, and the structure of the bureaucracy (bureaucratic structure) coordinated. Constraints tidal flood management policy implementation, among others, the border region with other regions of the tidal flood causing tidal flood handling is not complete, there are people who are less concerned rob flood mitigation program, facilities and infrastructure water pump and budget constraints. Efforts are being made to overcome these constraints include coordination with local authorities whose territory borders the tidal flood affected areas, community empowerment in tidal flood management, the improvement of facilities and infrastructure, and increased budget.

Keywords: Flood rob, Implementation

A. Pendahuluan

Banjir rob jika tidak ada penanganan yang signifikan dari pihak Pemerintah Kota Pekalongan, permukiman kumuh akibat banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan akan semakin besar dan meluas ke wilayah lain karena air laut yang setiap tahun semakin naik ke wilayah daratan akan menyebabkan banjir rob yang berasal dari bibir pantai. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan kebijakan penanganan banjir rob sebagai salah satu prioritas utama pembangunan Kota Pekalongan.

Prestasi yang telah diperoleh Kota Pekalongan dalam menangani permukiman kumuh dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan banjir rob yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan terutama di kawasan pesisir. Hal ini karena kawasan pesisir Kota Pekalongan merupakan kawasan yang memiliki jumlah titik banjir rob terbesar yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu juga karena merupakan kawasan yang rentan terhadap bahaya rob yang mempengaruhi permukiman pesisir menjadi kumuh. Berbagai kebijakan pemerintah Kota Pekalongan belum maksimal dalam pengelolaan dan pengurangan risiko bencana banjir rob. Pengurangan risiko banjir rob merupakan sebuah usaha terintegrasi yang melibatkan semua stakeholders dan sektor pembangunan untuk mengurangi kawasan yang rawan terjadi banjir rob yang berasal dari bibir pantai di dekat permukiman warga sekitar wilayah pesisir.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan.

C. Teori

C1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan. Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas bahwa segala tindakan dari pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut bersumber dari pilihan kolektifitas yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.¹ Berdasarkan pengertian kebijakan publik tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik

¹ William N.Dunn.2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik. hlm. 132

C.2 Teori Implementasi Kebijakan

Ada empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:
 - a. Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman dan keahlian.
 - b. Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
 - c. Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
 - d. Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
 - e. Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.²

C.3. Penanganan Banjir Rob

Beberapa alternatif penanganan rob telah dikemukakan para ahli, antara lain:³

1. Adaptasi

Maksud dari adaptasi ini adalah penyesuaian masyarakat terhadap kondisi rob, yaitu:

- a. Pindah ke lokasi yang lebih tinggi
- b. Membangun polder dan pompa.
- c. Menambah tanah di tempat yang mempunyai topografi rendah.
- d. Merubah jenis bangunan rumah (rumah panggung dan rumah susun)
- e. Menambah tinggi rumah (urug).

2. Memaksimalkan fungsi drainase.

Diantaranya dengan pembangunan drainase pasang surut dengan sistem polder. Sistem ini disinergikan dengan normalisasi sungai, pembangunan kolam penyimpanan air, pompa dan pintu air. Sistem drainase, terutama dikawasan pantai merupakan prasarana dasar pemukiman yang sangat penting, mengingat persoalan banjir akibat air pasang dan air hujan yang selalu menggenangi kawasan tersebut.

3. Alternatif lain teknik pengendalian banjir di daerah rob yang ramah lingkungan adalah gabungan atau kombinasi antara pemakai tendon air (parit yang sejajar pantai) dan pemompaan Dengan tenaga angin.

4. Pembangunan dam lepas pantai.

D. Metode Penelitian

D.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, digunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur maupun observasi

D.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang memiliki fenomena banjir rob yang terletak di bibir pantai.

D.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ini mencakup:

1. Masyarakat yang bermukiman di wilayah pesisir (yang mempunyai peran secara langsung maupun tidak langsung dalam peran mengatasi banjir rob)
2. Pihak Pemerintah Kota Pekalongan
3. Pihak lain yang terlibat seperti tim pakar, LSM dan masyarakat sekitar

²George C.Edwards III.1980.Implementing Publik.

³Lilik Kurniawan, 2003, *Kajian Banjir Rob di Kota Semarang*, Jurnal Alami Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2003, Jakarta, hlm. 56-57

D.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari subjek/sumber penelitian melalui wawancara maupun analisis lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berkenaan dengan focus penelitian. Data sekunder ini tidak langsung didapat dari subjek namun dari pihak lain. Data tambahan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan judul penelitian, seperti buku bacaan, arsip, kajian pustaka, Koran, dokumen-dokumen yang tersedia, serta dokumen-dokumen yang lain yang berhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.⁴ Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pengukuran suatu objek yang diteliti dalam berbagai situasi dan kondisi selama penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sebagai wilayah fokus penanggulangan banjir rob.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁵ Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan sederet pertanyaan yang relevan dengan penelitian secara langsung kepada informan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan kaitannya dengan pokok permasalahan dalam objek penelitian.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlangsung. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, maupun dokumen tidak tertulis-video rekaman dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi Data

Metode triangulasi digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

e. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang ditempuh adalah:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 57

⁵ Ibid.

- 3) Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaannya dengan praktek.

D. Hasil Penelitian

D1. Implementasi Kebijakan Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

Berdasarkan empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, maka peran DPU Kota Pekalongan dalam penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Banjir rob merupakan masalah yang berdampak pada masyarakat umum. Berkaitan dengan hal tersebut maka penanganannya juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk menanggulangi masalah banjir rob Pemerintah Kota Pekalongan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sartono, komunikasi dalam penanganan banjir rob dilakukan terhadap instansi terkait maupun masyarakat. Adapun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dilakukan terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan, Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Bandung, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kelurahan. Selain itu penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan dilakukan pula kepada masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi penanganan banjir rob.⁶

2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

a. Sumber daya manusia

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa sumber daya manusia pelaksana penanganan rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan DIII sebanyak 1 (satu) orang, sarjana sebanyak 12 (dua belas) orang dan pasca sarjana sebanyak 2 (dua) orang. Hal ini cukup memadai untuk melaksanakan penanganan rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan.

b. Informasi

Sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan sudah cukup baik. Walaupun masih terdapat kelemahan dengan adanya penyimpangan terhadap peraturan, khususnya mengenai kedisiplinan mengenai waktu.

c. Kewenangan

Menurut Slamet Miftakhudin, Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang melaksanakan penanganan banjir rob mempunyai kewenangan penuh terhadap setiap pekerjaan yang dibebankan. Kewenangan tersebut termasuk

⁶ Wawancara dengan Bapak Sartono, Kepala Seksi Pengendalian Banjir Bidang SDA DPU Kota Pekalongan tanggal 2 Juli 2015

dalam mengambil suatu keputusan. Namun demikian kewenangan tersebut tidak boleh menyimpang dari kebijakan dan atau ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Pada pelaksanaan di lapangan petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan melaksanakan tugas mengkoordinasikan para pekerja sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan gambar bestek maupun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).⁷

d. Sarana dan prasarana

Dari data wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan masih dirasa kurang memadai, seperti pompa air. Pompa air digunakan untuk menyedot genangan air yang menggenangi pemukiman warga. Keterbatasan pompa air sangat menghambat dalam pelaksanaan penanganan rob.⁸

e. Pendanaan

Melihat data mengenai penanganan banjir rob diketahui bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari APBN maupun APBD Kota Pekalongan. Melihat data penanganan rob pada tahun 2004 sampai dengan 2013 dibutuhkan dana sebesar Rp. 52,993,692,600.00. Berdasarkan data wawancara dengan Slamet Miftakhudin bahwa anggaran yang ada untuk penanganan rob di wilayah Pekalongan dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan anggaran biaya tersebut menyebabkan penanganan rob tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penanganan rob harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.⁹

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)

Antusiasme pelaksana kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan juga terlihat adanya kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah rawan banjir rob oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam berbagai kesempatan. Misalnya kunjungan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan yang melakukan survey lapangan saat akan dimulainya kegiatan pembangunan sarana penanganan banjir rob. Sikap yang positif dari pelaksana implementasi kebijakan penanganan rob juga ditunjukkan oleh para pekerja.¹⁰ Melihat kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksana penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam menyelesaikan masalah rob.

⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 4 Juli 2015.

⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 4 Juli 2015.

⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 4 Juli 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Amat Fauzan, Sekretaris Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, wawancara tanggal 7 Juli 2015.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Dilihat dari aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan penanganan rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan sudah tepat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yaitu melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan Walikota.

D.2 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

Implementasi kebijakan penanganan banjir rob masih ditemui beberapa kendala yang dapat mempersulit implementasinya. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Perbatasan wilayah banjir rob dengan wilayah lain menyebabkan penanganan banjir rob tidak tuntas

Wilayah Kota Pekalongan berbatasan dengan wilayah lain yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Perbatasan wilayah ini kadang sebagai kendala dalam penanganan banjir rob karena penanganan banjir tidak tuntas karena wilayah perbatasan yang juga sebagai wilayah banjir tidak mendapatkan penanganan atau kalau mendapatkan penanganan tidak bersamaan waktunya.¹¹

Sebagai contoh wilayah dukuh yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan di sebelah barat merupakan wilayah rawan banjir di Kota Pekalongan. Penanganan banjir rob di wilayah Kelurahan Dukuh Kota Pekalongan kurang berjalan maksimal jika tidak diikuti dengan penanganan banjir yang berbatasan yaitu wilayah Kelurahan Tirto Kabupaten Pekalongan.¹²

2. Terdapat masyarakat yang kurang peduli program penanganan banjir rob

Penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Sistem gotong royong merupakan cara yang biasa digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan meminimalisir banjir rob yang masuk ke wilayahnya. Selain itu untuk penanganan rob dibutuhkan tanah milik warga untuk dilewati *sand bag* namun masih ada masyarakat yang tidak mengizinkan tanahnya dilewati *sand bag* sebagai penahan pasang air laut. Hal ini tentu akan menghambat dalam penanganan rob.¹³

¹¹ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 10 Juli 2015.

¹² Wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 10 Juli 2015.

¹³ Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 10 Juli 2015

Selain itu masih terdapat masyarakat yang enggan memelihara *polder-polder* penahan air laut. Masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di dekat *polder* maupun saluran-saluran air sehingga mengotori lingkungan dan menghambat aliran air.¹⁴

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pompa air

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi banjir rob dengan menggunakan pompa air. Pompa air digunakan untuk menyedot genangan air rob yang masuk ke pemukiman warga. Walaupun hanya bersifat sementara, namun pompa air pompa air yang disediakan pemerintah Kota Pekalongan cukup membantu warga untuk mengeringkan genangan air yang ada di pemukiman. Namun sayangnya jumlah pompa air yang ada sangat terbatas, dan kondisinya juga sudah mulai rusak. Hal ini tentunya menghambat bagi warga yang hendak mengeringkan lingkungannya akibat genangan banjir rob.¹⁵

4. Keterbatasan Anggaran

Masalah keterbatasan anggaran suatu kegiatan merupakan masalah klasik. Anggaran biaya merupakan elemen utama dalam suatu kegiatan, tanpa ketersediaan anggaran yang cukup maka suatu kegiatan atau program tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula dalam masalah penanganan banjir rob, anggaran biaya merupakan hal yang utama. Penanganan banjir rob membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit karena merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur.

Menurut Slamet Miftakhudin keterbatasan anggaran biaya yang ada merupakan salah satu kendala utama dalam penanganan rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan . Luasnya wilayah Pesisir Kota Pekalongan yang terkena rob membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar. Namun kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Anggaran yang tersedia untuk penanganan banjir rob masih sangat terbatas. Kondisi demikian mengharuskan penanganan banjir rob dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang ada.¹⁶

Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad mengatakan, berbagai upaya untuk menangani permasalahan banjir rob terus dilakukan, hal ini semata untuk melindungi kota dan warga Pekalongan dan ditargetkan pada 2014 Kota Pekalongan bebas dari rob.¹⁷ Berbagai upaya dari mulai melokalisasi banjir, peninggian jalan di perkampungan, pembangunan lima folder, dan perbaikan sistem drainase, pembangunan rumah pompa hingga penanaman hutan mangrove telah dilakukan dengan menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah. Anggaran yang telah

¹⁴ Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 10 Juli 2015

¹⁵ Suratno, Warga Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, wawancara tanggal 11 Juli 2015.

¹⁶ Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 15 Juli 2015

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftakhudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 15 Juli 2015

dikucurkan cukup besar seperti untuk membangun folder setidaknya dikeluarkan anggaran Rp 25 miliar, pembangunan sistem drainase di Kelurahan Panjang Baru menelan anggaran Rp. 4,89 miliar, dan penanaman mangrove Rp1,1 miliar," kata Basyir. Namun, ujar Basyir, untuk menyempurnakan seluruh upaya penanggulangan rob masih menemui kendala yakni permasalahan dana, setidaknya dibutuhkan Rp. 600 miliar untuk dapat mengatasi rob tersebut. Pemkot Pekalongan masih terus melakukan upaya bantuan dana dari pemerintah pusat untuk mengatasi hal ini.¹⁸

D.3 Upaya Penanggulangan Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

Mengenai hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan tidak dapat dihindari. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa hambatan yang sifatnya teknis maupun non teknis, baik hambatan yang mudah diatasi maupun yang sulit diatasi. Terhadap hambatan-hambatan dalam penanggulangan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan dilakukan upaya-upaya penanggulangan, sebagai berikut:¹⁹

1. Koordinasi dengan pemerintah setempat yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah terdampak banjir rob.

Penanggulangan banjir rob harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan. Penanggulangan banjir rob juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain. Penanggulangan banjir rob secara parsial hasilnya tidak akan memuaskan. Demikian pula terhadap wilayah-wilayah Kota Pekalongan yang berbatasan dengan wilayah-wilayah lain yang sama-sama rawan banjir rob perlu adanya sinergi antar wilayah dalam penanggulangan banjir rob.

Agar penanggulangan banjir rob di wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Koordinasi dilakukan dalam upaya memaksimalkan penanggulangan banjir rob maupun dalam upaya preventif. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berbatasan wilayahnya dengan wilayah Kota Pekalongan akan lebih membantu dalam penanggulangan banjir rob dan dapat diminimalisir terjadinya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perbatasan wilayah.

Beberapa contoh kegiatan bersama warga Kota Pekalongan dengan warga perbatasan wilayah dalam penanggulangan dan atau pencegahan terjadinya banjir rob misalnya membersihkan sampah bersama, penanaman pohon mangrove, maupun pembuatan saluran air. Kegiatan bersama ini sangat bermanfaat bagi kedua wilayah dalam penanggulangan banjir rob secara terpadu.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan banjir rob

Pemberdayaan masyarakat Kota Pekalongan dalam pengentasan kemiskinan dan penataan pemukiman dilakukan melalui program pemerintah bernama Program

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftahudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 15 Juli 2015

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet Miftahudin, Kepala Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, wawancara tanggal 15 Juli 2015

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program PNPM Mandiri perkotaan merupakan program pemerintah yang bermaksud memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dalam hal ini sebagai subyek pembangunan. Masyarakat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri pembangunan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan prioritas yang ada.

Program PNPM Mandiri dilaksanakan melalui perencanaan yang bersifat partisipatif dalam penerapannya. Pada program ini masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pelaksanaan program ini dilakukan secara terpadu pada tingkat kawasan atau lingkungan yang sebenarnya merupakan aktualisasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan dengan melakukan pendekatan tridaya, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada program PNPM Mandiri perkotaan terdapat beberapa aspek pembangunan, seperti aspek sosial dan aspek lingkungan. Pada program PNPM Mandiri Perkotaan di lingkungan pesisir Kota Pekalongan masalah banjir rob merupakan salah satu program PNPM Mandiri pada aspek lingkungan. Penanggulangan banjir rob merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan.

Program penanggulangan banjir rob dilakukan dengan memetakan masalah terkait banjir rob dan apa saja akar penyebab permasalahannya terlebih dahulu, setelah itu masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa indikasi persoalan dan diprioritaskan, keterangannya yaitu persoalan kondisi jalan, kondisi saluran drainase, dan kondisi sekitar pantai untuk wilayah pemukiman pantai. Untuk pengimplementasiannya, disesuaikan dengan wilayah yang paling mendesak kebutuhannya. Sejauh ini program yang telah diimplementasikan untuk penanggulangan banjir rob di Kelurahan Panjang Baru diantaranya, peninggian jalan, dan pembangunan drainase. Masing-masing wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya untuk Kelurahan Dukuh hal yang mendesak yaitu peningkatan sarana jalan maupun saluran. Karena wilayah Kelurahan Dukuh masih sering tergenang rob karena jalan dan saluran air yang tidak terawat.

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan akan tumbuh kepedulian masyarakat terhadap masalah banjir rob yang melanda di sekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian masyarakat akan ikut aktif dalam penanggulangan banjir rob. Masyarakat berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan penanggulangan banjir rob secara mandiri. Hal ini akan menumbuhkan kesadarannya dalam mendukung program penanggulangan banjir rob melalui penataan lingkungan sebagai program dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pekalongan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana

Untuk meningkatkan penanggulangan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan sarana dan prasarannya. Pompa air sebagai salah satu sarana penanggulangan banjir rob yang bisa seketika mengurangi penderitaan masyarakat akibat banjir rob yaitu mengurangi debit air yang masuk ke pemukiman warga menjadi prioritas utama. Selain pengadaan pompa air yang baru, pemeliharaan sarana pompa air yang telah ada juga dilakukan. Hal ini agar penggunaan pompa – pompa air dapat dilakukan secara maksimal.

4. Peningkatan anggaran biaya

Masalah banjir rob di Kota Pekalongan merupakan salah satu masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Namun hal ini bukan persoalan yang mudah. Masalah keterbatasan anggaran biaya merupakan masalah klasik yang dihadapi dalam penanggulangan banjir rob. Hal ini mengingat penanggulangan banjir rob membutuhkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi keterbatasan masalah biaya ini menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan APBD. Anggaran biaya penanggulangan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan selalu diupayakan dilakukan peningkatan. Selain itu penggalan sumber-sumber anggaran lain selalu diupayakan misalnya melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat.

E. Penutup

E.1 Siimpulan

Implementasi kebijakan penanganan banjir rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan merupakan tugas sebagai instansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan di bidang pekerjaan umum yaitu pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, permukiman dan gedung daerah Berdasarkan empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, maka peran DPU Kota Pekalongan dalam penanganan Banjor Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan sudah berjalan dengan baik, yaitu adanya komunikasi yang berjalan lancar, ketersediaan sumberdaya (*resources*) yang cukup, adanya sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*) yang cukup kuat, dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) yang terkoordinasi

Kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanganan wilayah pesisir Kota Pekalongan antara lain perbatasan wilayah banjir rob dengan wilayah lain menyebabkan penanganan banjir rob tidak tuntas, terdapat masyarakat yang kurang peduli program penanganan banjir rob, keterbatasan sarana dan prasarana pompa air dan keterbatasan Anggaran

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan kebijakan penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan antara lain koordinasi dengan pemerintah setempat yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah terdampak banjir rob, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan banjir rob, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan anggaran biaya

E.2 Saran

Bagi Pemerintah Kota Pekalongan Perlu adanya perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanggulangan banjir rob, misalnya dengan meningkatkan jumlah anggaran penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan, mengingat anggaran biaya yang selama ini dikeluarkan untuk penanganan banjir rob jumlahnya masih sangat terbatas. Sementara masyarakat sudah bertahun-tahun merasakan banjir rob yang tidak kunjung selesai

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan agar lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Misalnya dengan meminta kesediaan masyarakat merelakan tanahnya sebagian kecil untuk pembuatan saluran air maupun kesediaan menjaga infrastruktur penanggulangan banjir rob misalnya saluran air, polder-polder. Masyarakat perlu lebih meningkatkan perannya dalam penanggulangan banjir rob di wilayah tempat tinggalnya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana penanggulangan banjir rob. Misalnya dengan memberikan swadaya anggaran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alkadri, dkk, 2014, *Pemetaan Pencapaian Milenium Development Goals Kota Pekalongan*, Serpong, Pusat Pengkajian kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT.

George C.Edwards III.1980.Implementing Publik.

H. Muchsin, dan Fadillah Putra, 2000, *Hukum dan Kebijakan Publik*,Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sedarmayanti; Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.

Samadi, 2006, *Geografi*, Jakarta, Yudistira.

Solichin Abdul Wahab.2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.

Winarno.2005.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*.

William N.Dunn.2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Website

<http://www.pekalongankota.go.id/2013/kawasan-rentan-rob-dikota-pekalongan.html>, diakses 2 April 2015.

<http://perencanaankota.blogspot.com/2005/teori-implementasi-program-kebijakan.html> diakses 18 April 2015

<http://www.pekalongankota.go.id/berita/akar-masalah-rob-mendesak-ditangani>, diakses 20 Agustus 2015

<http://www.pekalongankota.go.id/berita/akar-masalah-rob-mendesak-ditangani>, diakses 20 Agustus 2015

Jurnal

Haedar Akib, 2010, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010

Lilik Kurniawan, 2003, *Kajian Banjir Rob di Kota Semarang*, Jurnal Alami Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2003, Jakarta.

Lain-lain

Pemerintah Kota Pekalongan, 2013, *Pembangunan Infrastruktur di Kota Pekalongan*, Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan, *Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan - Rasa Swarga Gapuraning Bumi*. Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan, Profil Kota Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan, 2015, *Data Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Laporan Keuangan dan Koperasi*, Pekalongan, BPMP2T Kota Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan, 2008, *Sejarah Singkat Kota Pekalongan*, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Pekalongan.ANOTENG